

## Evaluasi Aplikasi E-Controlling dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Sony Abidin<sup>1)</sup>, Sri Kamariyah<sup>2)</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: sonyabidin@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan aplikasi E-Controlling dalam pengelolaan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Aplikasi ini diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam kriteria utama dari William N. Dunn (2003) diantaranya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan aplikasi ini serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi E-Controlling telah berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dengan memungkinkan akses real-time dan monitoring yang lebih baik. Efisiensi tercapai melalui pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses manual, serta pengurangan risiko kesalahan manusia. Kecukupan aplikasi ini terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pengguna, meskipun masih terdapat hambatan seperti masalah jaringan dan pemahaman teknologi oleh beberapa pengguna. Dari segi pemerataan, aplikasi ini memberikan akses yang setara kepada seluruh pegawai dan masyarakat yang berkepentingan. Responsivitas aplikasi tercermin dari kemampuannya dalam menanggapi umpan balik dan menyelesaikan masalah secara cepat. Ketepatan aplikasi terlihat dari kemampuannya dalam mencapai tujuan kebijakan, yakni peningkatan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, untuk memaksimalkan manfaat yang diberikan oleh aplikasi E-Controlling, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Gresik meningkatkan kualitas jaringan internet, menyediakan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif, serta mengembangkan fitur tambahan yang dapat meningkatkan fungsionalitas aplikasi. Dengan demikian, diharapkan aplikasi E-Controlling dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Aplikasi E-Controlling, Pengelolaan Laporan Keuangan

### Abstract

*This study aims to evaluate the use of the E-Controlling application in the management of financial reports at the Regional Government of Gresik Regency. The application is implemented as an effort to improve transparency, accuracy, and efficiency in regional financial management. The evaluation is conducted using six main criteria from William N. Dunn (2003), including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This research uses a descriptive qualitative method, which aims to provide an in-depth description of the implementation of this application and the factors influencing its implementation results. The results show that the E-Controlling application has successfully improved the effectiveness of financial management by enabling real-time access and better monitoring. Efficiency is achieved through the reduction of time and costs required for manual processes, as well as reducing the risk of human error. The adequacy of this application is seen in its ability to meet user needs, although there are still barriers such as network issues and users' understanding of technology. In terms of equity, the application provides equal access to all employees and relevant stakeholders. The responsiveness of the application is reflected in its ability to respond to feedback and resolve issues promptly. The accuracy of the application is evident in its ability to achieve policy goals, namely improving transparency, accuracy, and efficiency in financial management. However, to maximize the benefits provided by the E-Controlling application, it is recommended that the Gresik Regency Government improve internet network quality, provide more intensive training and socialization, and develop additional features that can enhance the functionality of the application. Therefore,*

*it is expected that the E-Controlling application can make a greater contribution to overall regional financial management.*

**Keywords:** *Evaluation, E-Controlling Application, Financial Report Management*

## **A. LATAR BELAKANG**

*Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan, di mana pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama serta merupakan konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Pemerintahan harus mempunyai tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi adalah mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan keputusan secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik setiap aktivitas yang dilakukan. Kepemerintahan yang baik memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Untuk itu, perlu adanya reformasi di bidang keuangan negara. Reformasi di bidang keuangan negara dilakukan dengan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik.

Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini berlangsung pesat dan merambah hampir semua aspek kehidupan. Hal ini menuntut semua sektor, baik swasta maupun pemerintah, untuk melakukan penyesuaian dan inovasi untuk menunjang kualitas pelayanan mereka seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Diharapkan dengan menggunakan suatu teknologi ataupun pengaplikasian suatu sistem informasi, baik individu maupun organisasi dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efisien.

Dengan melihat hal di atas, diperlukan sarana yang dapat meringankan tugas seorang pemimpin, terutama pada bagian perencanaan dan keuangan, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, terutama masalah pengolahan data

monitoring dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman di era digitalisasi dengan diterbitkannya Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang mempunyai prinsip meliputi efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Tidak hanya itu, terdapat beberapa peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan-aturan ini diterapkan melalui penggunaan aplikasi sistem informasi yang dibangun untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Fahmi (2019), laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi

keuangan suatu perusahaan, dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. PSAK No. 1 (revisi 2009) juga menyatakan bahwa laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan.

Aplikasi berbasis teknologi informasi dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data penyerapan anggaran. Hal ini tentunya akan mempermudah proses pengawasan dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran oleh pihak-pihak terkait. Pemerintah saat ini diharapkan mampu memanfaatkan TI untuk administrasi pengolahan APBD. Salah satu solusi yang diterapkan adalah penggunaan aplikasi E-Controlling. Sebelum adanya aplikasi E-Controlling, pengelolaan keuangan di pemerintah daerah Kab. Gresik dilakukan secara manual, menggunakan berkas fisik, dan proses pengiriman berkas secara manual, artinya berkas fisik dari masing-masing OPD dikirim ke Bagian Administrasi Pembangunan tidak lewat online. Aplikasi E-Controlling adalah bagian dari *Government Resources Management System* (GRMS) di Kabupaten Gresik. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen seperti perencanaan secara elektronik (*e-planning*), penganggaran secara elektronik (*e-budgeting*), penatausahaan aset secara elektronik (*e-treasury*), dan pengendalian kinerja secara elektronik (*e-controlling*). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks hukum, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) telah semakin meningkat. Ini sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik tentang Penyelenggaraan E-Government di Pemerintah Kabupaten Gresik (GRMS, Gresikkab, jdih.gresikkab.go.id).

Aplikasi E-Controlling merupakan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan yang menggunakan teknologi informasi. Aplikasi E-Controlling adalah sistem informasi yang

meliputi perencanaan penyerapan anggaran, perencanaan realisasi fisik, dan perencanaan realisasi pendapatan. Selain itu, aplikasi E-Controlling juga berfungsi sebagai jejaring untuk mengumpulkan laporan keuangan secara cepat dan efisien menggunakan teknologi informasi. Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai dukungan dalam perencanaan keuangan, kegiatan, dan evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif, dan efisien. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan untuk mendukung monitoring dan evaluasi realisasi keuangan pemerintah daerah.

Saat ini, pelaporan penyerapan anggaran dengan sistem aplikasi diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap OPD wajib melaporkan kegiatan APBD melalui aplikasi E-Controlling setiap bulannya. Salah satu alternatif yang dapat membantu hal tersebut adalah dengan menerapkan sistem informasi dalam suatu instansi untuk mengolah data dalam rangka pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan sistem informasi, diharapkan dapat diperoleh data secara tepat waktu, akurat, relevan, lengkap, dan lebih efisien waktu, tenaga, dan biaya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengevaluasi aplikasi E-Controlling. Diharapkan pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Gresik dapat lebih efektif, efisien, dan terjamin keakuratannya. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengambil judul “Evaluasi Aplikasi E-Controlling dalam Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.”

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Smith (2010:25), kebijakan publik dapat diartikan sebagai

proses pembuatan keputusan yang melibatkan pemerintah dan berorientasi pada penyelesaian masalah sosial, ekonomi, atau politik yang ada. Kebijakan ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Dalam konteks lain, Jones (2015:38) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari interaksi berbagai aktor dalam pemerintahan yang mengatur dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan perumusan keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Kebijakan ini dapat berupa undang-undang, peraturan, atau program-program pemerintah yang dilaksanakan untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan Anderson (2018:42), kebijakan publik juga dapat dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Proses pembuatan kebijakan ini mencakup evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, melalui serangkaian keputusan dan program yang dibuat berdasarkan analisis serta evaluasi kebutuhan publik.

## **2. Proses Perumusan Kebijakan Publik**

Proses perumusan kebijakan publik merupakan serangkaian tahapan yang dilalui oleh pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang tepat guna menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Menurut Smith (2011:120), tahapan pertama dalam proses ini adalah identifikasi masalah yang perlu diatasi, diikuti dengan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk

memahami konteks dan dampaknya. Selanjutnya, setelah masalah teridentifikasi, dilakukan analisis terhadap berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan. Proses ini juga melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, ahli, dan stakeholder lainnya, untuk mendapatkan masukan yang beragam. Setelah berbagai alternatif dipertimbangkan, pengambil kebijakan akan memilih opsi terbaik yang dinilai paling efektif dan efisien. Selain itu, perumusan kebijakan ini juga mencakup penentuan tujuan yang jelas, penetapan strategi implementasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perumusan kebijakan publik adalah sebuah pendekatan sistematis yang mengutamakan analisis, partisipasi, dan evaluasi dalam menciptakan solusi kebijakan yang berkelanjutan.

## **3. Tahapan Kebijakan**

Dalam kajian kebijakan publik, terdapat berbagai model yang menjelaskan tahapan dalam siklus kebijakan. Salah satu model yang paling umum adalah model siklus kebijakan yang dibagi dalam beberapa tahapan utama, seperti identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Berikut adalah penjelasan tahapan tersebut menurut Dye (2013:59):

### **a) Identifikasi Masalah**

Tahapan pertama adalah pengenalan dan identifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Ini bisa datang dari masyarakat, media, atau pejabat pemerintah yang mengamati ketimpangan atau isu-isu yang membutuhkan perhatian.

### **b) Perumusan Kebijakan**

Setelah masalah teridentifikasi, tahap berikutnya adalah merumuskan kebijakan. Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi dipertimbangkan, dan

pemerintah menyusun rancangan kebijakan yang akan diambil.

c) **Legislasi dan Pengesahan**

Pada tahapan ini, kebijakan yang telah dirumuskan harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif atau pihak yang berwenang untuk diimplementasikan.

d) **Implementasi Kebijakan**

Kebijakan yang telah disahkan akan diterapkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang ditunjuk. Proses implementasi ini melibatkan alokasi sumber daya, koordinasi antar pihak, dan pelaksanaan tindakan di lapangan.

e) **Evaluasi Kebijakan**

Setelah kebijakan diterapkan, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dan dampaknya. Evaluasi ini akan memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan di masa depan atau untuk memutuskan apakah kebijakan tersebut perlu disesuaikan atau dihentikan.

Model ini menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang berkelanjutan, dan hasil evaluasi kebijakan sering kali mengarah pada penyesuaian kebijakan atau identifikasi masalah baru yang memerlukan solusi lebih lanjut.

#### 4. **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai efektivitas dan dampak dari suatu kebijakan publik yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan dalam perbaikan kebijakan selanjutnya.

William N. Dunn (2017) mengemukakan enam kriteria utama dalam evaluasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan publik secara lebih komprehensif. Berikut adalah penjelasan

tentang enam kriteria tersebut dan kaitannya dengan evaluasi kebijakan:

a) **Efektivitas:** Kriteria ini menilai apakah kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Misalnya, jika kebijakan bertujuan mengurangi kemiskinan, evaluasi akan melihat sejauh mana kebijakan berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan.

b) **Efisiensi:** Efisiensi mengukur apakah kebijakan dapat memberikan hasil yang optimal dengan sumber daya yang minimal.

Evaluasi ini memeriksa apakah anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Misalnya, apakah dana yang digunakan untuk program pendidikan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

c) **Keadilan:** Keadilan memastikan bahwa manfaat kebijakan didistribusikan secara adil, terutama kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Misalnya, apakah kebijakan tersebut memperhatikan kelompok miskin atau rentan dan memastikan mereka mendapatkan akses yang sama.

d) **Responsivitas:** Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan mampu merespon perubahan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan harus fleksibel dan mampu menanggapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi selama pelaksanaannya.

e) **Keterjangkauan:** Keterjangkauan menilai apakah kebijakan dapat diakses dengan mudah oleh kelompok sasaran, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan.

Kebijakan yang baik harus memungkinkan semua pihak yang membutuhkan untuk mengakses manfaat yang diberikan.

f) **Keberlanjutan:** Keberlanjutan menilai apakah kebijakan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Kebijakan yang berkelanjutan tidak hanya efektif saat pertama kali diterapkan, tetapi juga mampu dipertahankan dalam waktu lama,

baik dari sisi pendanaan, dukungan politik, maupun sosial.

## 5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen formal yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk membantu pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Harahap (2019:105), laporan keuangan didefinisikan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan biasanya terdiri dari:

- Laporan Laba Rugi: Menggambarkan kinerja keuangan perusahaan melalui pendapatan dan beban selama periode tertentu.
- Laporan Posisi Keuangan (Neraca): Menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu.
- Laporan Perubahan Ekuitas: Menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode pelaporan.
- Laporan Arus Kas: Menggambarkan aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
- Catatan atas Laporan Keuangan: Memberikan informasi tambahan untuk mendukung angka-angka dalam laporan keuangan utama.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2020:15), tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna dalam menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas entitas yang dilaporkan.

## 6. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memastikan transparansi,

akurasi, dan keandalan informasi keuangan suatu entitas. Beberapa faktor utama yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah:

- Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi: Memahami dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku sangat penting untuk memastikan laporan keuangan disusun dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
- Kualitas Sumber Daya Manusia: Tim akuntansi yang terampil dan berpengalaman akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik.
- Sistem Informasi Keuangan: Sistem informasi keuangan yang efektif mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan.
- Kontrol Internal: Kontrol internal yang kuat membantu mencegah kesalahan dan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan.
- Kepentingan Pihak Terkait: Tekanan dari investor, kreditor, dan regulator untuk mendapatkan informasi keuangan yang akurat dan relevan akan mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, entitas dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya, membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, dan menjaga reputasi serta kelancaran operasional bisnisnya (Harahap, 2019:108).

## 7. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan terperinci kepada para pemangku kepentingan. Tujuan utama laporan keuangan adalah:

- Pengambilan Keputusan Manajerial: Membantu manajemen dalam menganalisis kinerja operasional dan membuat keputusan strategis yang tepat.
- Evaluasi Kinerja: Memungkinkan evaluasi kinerja keuangan entitas dan

- perbandingan dengan periode sebelumnya atau pesaing.
- c) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi aktivitas keuangan dan akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan.
  - d) **Pemenuhan Regulasi:** Memenuhi persyaratan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, laporan keuangan berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi entitas dan para pemangku kepentingannya (Harahap, 2019:110).

## 8. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik atau pemerintah terdiri dari enam komponen utama yang saling terkait dan memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan dan kinerja entitas selama periode tertentu.

- a) **Laporan Realisasi Anggaran (LRA):** Menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah direncanakan telah terealisasi dalam bentuk pengeluaran atau belanja.
- b) **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL):** Menjelaskan perubahan saldo anggaran lebih dari satu periode ke periode lainnya.
- c) **Neraca:** Mencerminkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas entitas, memberikan gambaran tentang struktur keuangan, likuiditas, dan kemampuan memenuhi kewajiban.
- d) **Laporan Operasional:** Merangkum sumber daya ekonomi yang meningkatkan ekuitas dan bagaimana penggunaannya dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah.
- e) **Laporan Arus Kas:** Menyajikan informasi tentang arus kas terkait dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitori, membantu dalam memantau dan mengelola arus kas entitas pemerintah.

- f) **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):** Menunjukkan perubahan dalam ekuitas entitas dari satu periode ke periode lainnya, mencakup kontribusi modal, laba atau rugi bersih, dividen, dan faktor-faktor lainnya.

Keenam komponen ini bekerja bersama untuk memberikan informasi yang komprehensif dan transparan tentang pengelolaan keuangan sektor publik, mendukung akuntabilitas, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat (Mardiasmo, 2018:135).

## 9. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami merupakan prinsip penting yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2020:10).

- a) **Relevan:** Informasi dalam laporan keuangan harus berguna bagi para pengguna dalam mengambil keputusan, mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi hasil di masa depan.
- b) **Keandalan:** Laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan bias, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber informasi yang akurat dan objektif.
- c) **Dapat Dibandingkan:** Laporan keuangan harus disusun dengan konsistensi dalam pengukuran dan penyajian, sehingga pengguna dapat membandingkan laporan keuangan antar periode dan antar entitas.
- d) **Dapat Dipahami:** Informasi dalam laporan keuangan harus disusun dengan jelas dan mudah dipahami oleh para pengguna, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang keuangan.

Dengan memenuhi keempat karakteristik ini, laporan keuangan menjadi alat yang efektif dan bernilai bagi para pemangku kepentingan dalam memahami

kondisi keuangan entitas, mengevaluasi kinerja, dan membuat keputusan yang tepat.

## 10. E-Government

*E-government* merupakan konsep penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintah di era digital. Implementasi *e-government* di Indonesia dijalankan berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 dan Keppres Nomor 20 Tahun 2006, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, responsif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.

Transformasi *e-government* melibatkan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghilangkan sekat-sekat birokrasi dan membentuk jaringan sistem yang terpadu. Manfaat *e-government* meliputi peningkatan kualitas layanan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai integrasi sistem *e-government* secara nasional, diperlukan kerangka komunikasi antar sistem (GIF) dan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi. Sistem aplikasi *e-government* harus memenuhi kriteria *reliable*, *interoperable*, *scalable*, *user-friendly*, dan *integratable* untuk memastikan fungsi yang andal, interkoneksi, skalabilitas, kemudahan penggunaan, dan integrasi dengan sistem lain.

Dengan demikian, *e-government* menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era digital (Mardiasmo, 2018:147).

## 11. Aplikasi E-Controlling

Aplikasi E-Controlling adalah suatu sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap berbagai aktivitas dan program dalam suatu organisasi, baik sektor publik

maupun swasta. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akurasi, serta transparansi dalam pengelolaan data dan informasi.

Fungsi utama aplikasi E-Controlling meliputi:

- Monitoring Real-Time: Memantau perkembangan pelaksanaan program atau kegiatan secara langsung.
- Pengelolaan Data Terpusat: Menyediakan platform terintegrasi untuk mengelola data dari berbagai sumber.
- Evaluasi Kinerja: Membantu dalam analisis kinerja berdasarkan data yang terpantau, sehingga memudahkan pengambilan keputusan.
- Peningkatan Transparansi: Mengurangi potensi penyimpangan dengan menyajikan informasi yang terbuka dan akuntabel.
- Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Memberikan rekomendasi atau laporan berdasarkan data yang terproses secara otomatis.

Dalam sektor publik, aplikasi ini sangat relevan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, seperti pemantauan anggaran, pengelolaan sumber daya, dan pencapaian indikator kinerja utama. Dengan implementasi yang tepat, aplikasi E-Controlling mampu meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi, mendorong akuntabilitas, dan mempercepat respon terhadap perubahan atau permasalahan yang muncul (Saragih, 2020:56).

## 12. Evaluasi Aplikasi E-Controlling

Evaluasi aplikasi E-Controlling adalah proses penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak aplikasi ini dalam konteks penggunaannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Aplikasi ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam proses pemantauan anggaran dan meningkatkan aksesibilitas informasi terkait penyerapan anggaran. Evaluasi ini fokus pada enam aspek utama menurut teori William N. Dunn (2018:45):

- a) Efektivitas: Sejauh mana aplikasi membantu mencapai tujuan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan menyediakan informasi yang akurat serta tepat waktu untuk pengambilan keputusan.
- b) Efisiensi: Sejauh mana aplikasi dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan metode konvensional, serta menilai penggunaan sumber daya manusia dan teknis.
- c) Kecukupan: Sejauh mana aplikasi mampu mengatasi masalah utama dalam pengelolaan anggaran dan apakah fitur-fitur yang disediakan sudah mencukupi kebutuhan pengguna.
- d) Ekuitas: Sejauh mana aplikasi mudah diakses dan digunakan oleh semua pengguna yang berwenang, serta menilai distribusi manfaat aplikasi di antara berbagai unit kerja.
- e) Responsivitas: Sejauh mana aplikasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, serta menilai kecepatan dan keandalan aplikasi dalam merespon perubahan atau permintaan informasi.
- f) Ketepatan: Sejauh mana aplikasi relevan dalam konteks pengelolaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Gresik dan sesuai dengan standar serta regulasi yang berlaku.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang evaluasi aplikasi E-Controlling dalam pengelolaan laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Pilihan metode kualitatif didasarkan pada sifat masalah yang diteliti, yang mungkin belum jelas atau data yang relevan belum tersedia.

Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan melakukan

eksplorasi guna mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan menyeluruh tentang fenomena yang kompleks serta belum terdefinisi dengan baik. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, dan memo lainnya, yang kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan konteks dan latar belakang informasi yang diberikan.

### 2. Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi aplikasi E-Controlling dalam pengelolaan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn (2018:45), yang mengidentifikasi enam kriteria utama untuk menilai efektivitas aplikasi:

- a) Efektivitas: Aplikasi E-Controlling membantu dalam mencapai tujuan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan menyediakan informasi yang akurat serta tepat waktu untuk pengambilan keputusan.
- b) Efisiensi: Aplikasi E-Controlling menggunakan sumber daya manusia dan teknis dengan baik serta menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan metode tradisional.
- c) Kecukupan: Aplikasi E-Controlling mampu mengatasi masalah utama dalam pengelolaan anggaran, dan fitur-fiturnya sudah mencukupi kebutuhan pengguna.
- d) Pemerataan: Aplikasi E-Controlling memberikan manfaat yang merata di berbagai unit kerja serta mudah diakses dan digunakan oleh semua pengguna yang berwenang.
- e) Responsivitas: Aplikasi E-Controlling dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna serta merespons perubahan atau permintaan informasi dengan cepat dan andal.
- f) Ketepatan: Aplikasi E-Controlling relevan dalam konteks pengelolaan anggaran di Pemerintah Kabupaten

Gresik serta sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi E-Controlling telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman pengguna, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan kesalahan input data. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat serta meningkatkan efektivitas aplikasi E-Controlling di masa depan.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Kabupaten Gresik, Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 243, Gresik, Jawa Timur. Penelitian dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gresik, yang merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan laporan keuangan daerah. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat administrasi keuangan dan pelaksanaan aplikasi E-Controlling dalam pengelolaan laporan keuangan daerah. Selain itu, kantor ini juga menjadi tempat utama untuk memperoleh data yang relevan serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Gresik.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Evaluasi Aplikasi E-Controlling dalam Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan analisis enam kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (2018: 45), aplikasi E-Controlling dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Gresik telah menunjukkan kinerja

yang baik dan memenuhi sebagian besar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### a) Efektivitas

Aplikasi E-Controlling terbukti efektif dalam mencapai tujuan utama pengelolaan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Akses real-time dan monitoring yang lebih baik mempercepat proses pengawasan dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran. Sistem ini memungkinkan pejabat pengelola keuangan untuk memantau kinerja anggaran dengan lebih cermat dan cepat, yang pada akhirnya meningkatkan ketepatan keputusan dalam pengalokasian dana. Dengan informasi yang lebih transparan dan terperinci, aplikasi E-Controlling berperan penting dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih akurat dan sesuai kebutuhan daerah.

#### b) Efisiensi

Aplikasi E-Controlling telah meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengelola anggaran. Otomatisasi proses manual mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan penyelesaian tugas. Sebelumnya, proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan memakan waktu yang lama dan rentan terhadap human error, yang dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam laporan anggaran. Dengan aplikasi ini, seluruh proses menjadi lebih terstruktur dan efisien, menghemat waktu serta mengurangi biaya operasional, baik dalam aspek pelaporan maupun pengawasan anggaran.

#### c) Kecukupan

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi E-Controlling sudah cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna. Meskipun ada beberapa saran untuk penambahan fitur,

secara keseluruhan aplikasi ini sudah memadai dalam pelaporan keuangan. Aplikasi ini mencakup berbagai fitur seperti monitoring anggaran, pelaporan keuangan, serta analisis real-time yang memberikan gambaran jelas mengenai status keuangan daerah. Pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan untuk proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan, yang memudahkan pengambil keputusan dalam menilai performa keuangan daerah.

d) Pemerataan

Aplikasi E-Controlling telah berhasil menciptakan pemerataan dalam penggunaan teknologi untuk pengelolaan keuangan. Dengan fitur-fitur yang memadai dan kemudahan penggunaan, aplikasi ini telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan keuangan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh berbagai unit kerja di Pemerintah Kabupaten Gresik, mulai dari BPKAD hingga berbagai dinas terkait yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Penggunaan teknologi yang merata ini membantu menciptakan keseragaman dalam pengelolaan data dan informasi keuangan di seluruh pemerintah daerah, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pengawasan maupun pelaporan anggaran antar unit kerja.

e) Responsivitas

Aplikasi E-Controlling responsif dalam menanggapi kebutuhan dan perubahan yang terjadi, serta dalam menyelesaikan masalah yang muncul secara cepat. Sistem online memudahkan akses informasi dan monitoring anggaran. Kecepatan sistem dalam memberikan update informasi dan respons terhadap perubahan atau permintaan informasi sangat membantu dalam menjaga kelancaran pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan anggaran dan kebijakan yang terus

berkembang. Responsivitas yang tinggi ini juga berperan dalam memastikan akurasi dan kelancaran pelaporan keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat.

f) Ketepatan

Aplikasi E-Controlling tepat dalam mencapai tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Sistem ini memungkinkan monitoring anggaran yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Dengan sistem yang memberikan informasi yang jelas, rinci, dan tepat waktu, aplikasi ini mendukung tercapainya akuntabilitas yang lebih tinggi di sektor publik. Selain itu, aplikasi ini juga mempermudah proses pelaporan yang lebih tepat sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, sehingga memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

## 2. Dampak Positif Aplikasi E-Controlling dalam Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gresik

Aplikasi E-Controlling memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan aplikasi ini, seluruh transaksi dan alokasi anggaran dapat dipantau secara real-time, yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk dengan mudah mengakses dan memverifikasi data keuangan. Hal ini berdampak pada terciptanya kepercayaan yang lebih besar antara pemerintah daerah dan masyarakat, karena laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks akuntabilitas, E-Controlling memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipantau dan dievaluasi dengan lebih mudah dan jelas.

Selain itu, aplikasi E-Controlling juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional dalam pengelolaan laporan keuangan. Sebelumnya, pengolahan data anggaran dan laporan keuangan memerlukan waktu yang lama dan sering kali rentan terhadap kesalahan manusia. Dengan adanya aplikasi ini, proses-proses manual yang memakan waktu dan berisiko kesalahan dapat digantikan dengan otomatisasi, sehingga mempercepat proses pelaporan dan pengawasan anggaran. Efisiensi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya operasional yang sebelumnya diperlukan untuk pengolahan data secara manual. Hal ini berkontribusi pada pengelolaan anggaran yang lebih hemat dan produktif.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan akurasi dalam pelaporan keuangan. Aplikasi E-Controlling memungkinkan pengolahan data yang lebih sistematis dan terstruktur, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan input atau pengolahan data yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi dan menggunakan format yang baku, seluruh informasi keuangan dapat disusun dengan lebih tepat dan konsisten. Akurasi laporan ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan data keuangan yang valid dan dapat dipercaya. Hal ini juga memudahkan pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, E-Controlling memberikan dampak positif terhadap responsivitas pengelolaan anggaran. Aplikasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons perubahan anggaran atau kebutuhan mendesak dengan lebih cepat. Karena aplikasi ini dapat memberikan data secara real-time, setiap perubahan atau pergeseran anggaran dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti dengan lebih efisien. Dalam kondisi yang dinamis, di mana

kebutuhan anggaran sering berubah, responsivitas yang tinggi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat dan sesuai dengan prioritas yang ada.

E-Controlling juga berperan dalam memperkuat pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan aplikasi ini, seluruh proses pengelolaan anggaran dapat dipantau secara langsung oleh berbagai unit terkait di pemerintah daerah, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pejabat pengelola keuangan untuk melakukan pemantauan terhadap anggaran secara lebih cermat, mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian, dan memberikan solusi secara cepat. Pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur ini membantu mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Terakhir, aplikasi E-Controlling juga mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan laporan keuangan. Dengan kemudahan penggunaan dan fitur yang user-friendly, aplikasi ini memfasilitasi pengguna, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis, untuk memahami dan menggunakan sistem dengan baik. Hal ini meningkatkan keterampilan dan pemahaman para pegawai pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Seiring dengan waktu, pelatihan yang berkelanjutan mengenai penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan kapasitas SDM yang ada, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan efisien.

Meski aplikasi E-Controlling telah memberikan banyak dampak positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain masalah terkait infrastruktur teknologi yang belum merata di semua unit kerja, serta kurangnya pelatihan bagi pengguna di

lapangan. Untuk itu, disarankan agar pemerintah Kabupaten Gresik terus melakukan peningkatan kapasitas infrastruktur TI dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pengguna aplikasi agar pengoperasian aplikasi dapat berjalan dengan lebih optimal. Selain itu, penguatan pengawasan dan audit internal untuk mencegah kesalahan input data dan memastikan keakuratan laporan keuangan juga menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan.

### 3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Evaluasi Aplikasi E-Controlling dalam Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gresik

Keberhasilan implementasi aplikasi E-Controlling di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh beberapa faktor penting, yaitu:

- a) Kemudahan Akses dan Penggunaan: Aplikasi E-Controlling dirancang dengan antarmuka yang mudah dipahami dan dapat diakses melalui berbagai perangkat, sehingga mempercepat proses pelaporan dan pengawasan.
- b) Infrastruktur yang Memadai: Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan perangkat komputer yang memadai memastikan kelancaran operasional aplikasi.
- c) Pelatihan dan Tim Teknis: Pelatihan yang efektif serta keberadaan tim teknis yang responsif menjamin bahwa pengguna dapat memanfaatkan aplikasi secara optimal dan memperoleh bantuan jika mengalami kendala.
- d) Integrasi Data: Integrasi aplikasi E-Controlling dengan sistem lain memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif, sehingga analisis keuangan dapat dilakukan secara menyeluruh.
- e) Evaluasi Berkelanjutan: Pengawasan dan evaluasi berkala memastikan bahwa aplikasi E-Controlling tetap optimal, mampu beradaptasi dengan perubahan

kebutuhan, dan terus memberikan manfaat maksimal bagi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dengan faktor-faktor pendukung tersebut, aplikasi E-Controlling di Kabupaten Gresik tidak hanya diterapkan dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi ini berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga mendukung tercapainya pengelolaan keuangan yang lebih baik.

### 4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Evaluasi Aplikasi E-Controlling dalam Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gresik

Aplikasi E-Controlling telah memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik; namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas aplikasi ini. Berikut adalah faktor-faktor penghambat yang perlu diperhatikan:

- a) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Pengguna perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya aplikasi E-Controlling dalam mendukung efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- b) Keterbatasan Infrastruktur: Ketersediaan jaringan internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, dan sumber daya IT yang cukup di seluruh OPD sangat penting untuk mendukung penggunaan aplikasi E-Controlling secara optimal.
- c) Kesalahan Input Data: Kesalahan dalam input data atau keterlambatan pembaruan data dapat mengurangi ketepatan informasi yang dihasilkan oleh aplikasi. Peningkatan pelatihan serta kontrol kualitas data menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ini.
- d) Keengganan Beralih ke Sistem Digital: Beberapa pihak mungkin masih enggan

meninggalkan cara-cara konvensional dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang efektif serta menunjukkan manfaat nyata dari aplikasi E-Controlling diperlukan untuk mendorong adopsi sistem digital.

Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat ini, aplikasi E-Controlling dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, perbaikan berdasarkan kriteria evaluasi William N. Dunn akan membantu memaksimalkan manfaat aplikasi E-Controlling di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam kriteria evaluasi kebijakan publik oleh William N. Dunn, aplikasi E-Controlling dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Gresik telah menunjukkan kinerja yang baik dan memenuhi sebagian besar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut adalah kesimpulan dari evaluasi aplikasi E-Controlling:

- a) Efektivitas: Aplikasi E-Controlling telah berhasil meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Pengguna dapat dengan mudah mengakses dan memantau laporan keuangan secara real-time.
- b) Efisiensi: Penggunaan aplikasi ini mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan secara manual. Proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data menjadi lebih cepat serta mengurangi risiko kesalahan manusia.
- c) Kecukupan: Aplikasi ini cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan pengguna untuk memantau dan mengevaluasi anggaran. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti masalah jaringan dan kurangnya pemahaman teknologi oleh beberapa pengguna.

- d) Pemerataan: Aplikasi E-Controlling telah menciptakan pemerataan dalam penggunaan teknologi untuk pengelolaan keuangan. Aplikasi ini diterima dengan baik oleh berbagai kalangan di Pemerintah Kabupaten Gresik dan dinilai memadai dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan.
- e) Responsivitas: Aplikasi ini responsif dalam menanggapi kebutuhan dan perubahan masyarakat, serta dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan pengguna.
- f) Ketepatan: Aplikasi ini tepat dalam mencapai tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Sistem ini memungkinkan monitoring anggaran yang lebih transparan dan dapat diandalkan.

### 2. Rekomendasi

Meskipun aplikasi E-Controlling telah menunjukkan kinerja yang baik, terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaat yang diberikan. Berikut adalah beberapa saran untuk perbaikan:

- a) Peningkatan Jaringan: Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas jaringan internet agar aplikasi dapat berfungsi dengan optimal tanpa gangguan.
- b) Pelatihan dan Sosialisasi: Menyediakan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada pegawai dan masyarakat mengenai penggunaan aplikasi E-Controlling untuk memastikan semua pengguna dapat memanfaatkannya dengan baik. Pendampingan bagi pengguna baru juga diperlukan agar mereka lebih cepat beradaptasi dengan aplikasi dan dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia secara optimal.
- c) Dukungan Teknologi: Menyediakan dukungan teknis yang memadai untuk

- membantu pengguna yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi.
- d) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi terus memenuhi kebutuhan pengguna dan tetap relevan dengan perubahan yang terjadi.
- e) Pengembangan Fitur Tambahan: Mengembangkan fitur tambahan yang dapat meningkatkan fungsionalitas aplikasi, seperti notifikasi otomatis untuk pembaruan data atau laporan.

Dengan memperhatikan dan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan aplikasi E-Controlling dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan meningkatkan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Gresik secara keseluruhan.

## REFERENSI

- Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 34–38.
- Anggara, S. (2018). *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Awan, Y., Abdoelah, & Yudi, R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Endang, S. P., Baiq, A. H. L., & Widia, A. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 598–607.
- Evin, C., Daniel, H. P., & Daniel, S. (2019). Pembuatan Mobile Controlling System pada Instansi Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(2), 4806–4821.
- Ikhwan, M. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin. *Jurnal Institut Praja Dalam Negeri*, 1(4), 1–16.
- Maghfiroh, N. A. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (E-Controlling) pada Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*, 4(4), 401–418.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Upaya Pemerintah Indonesia untuk Memodernisasi Pemerintahan dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

